

Pariwisata Berbasis Komunitas Sebagai Strategi Pemberdayaan: Tinjauan Konseptual dari Perspektif Pendidikan Nonformal

Yolandika Arsyad^{1*)}

¹Universitas Negeri Makassar

*Corresponding author, e-mail: yolandika.arsyad@unm.ac.id

Agustus, 2025;
Agustus, 2025;
Oktober, 2025;
Oktober, 2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji kembali konsep *Community-Based Tourism* (CBT) dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, serta menjelaskan peran pendidikan nonformal dalam memperkuat kapasitas komunitas untuk mengelola pariwisata berbasis komunitas secara mandiri. Menggunakan metode kajian literatur terhadap publikasi ilmiah terindeks dalam sepuluh tahun terakhir, penelitian ini menganalisis bagaimana CBT, pendidikan nonformal, dan pemberdayaan masyarakat terintegrasi dalam praktik pembangunan lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan CBT sangat dipengaruhi oleh partisipasi warga, tata kelola komunitas, dan kapasitas sosial-ekonomi yang diperkuat melalui pendidikan nonformal. Selain itu, integrasi ketiga komponen tersebut menghasilkan model pembangunan lokal yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan nonformal merupakan pilar strategis yang memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam implementasi CBT.

Kata Kunci: Pariwisata Berbasis Komunitas, Pendidikan Nonformal, Pemberdayaan Masyarakat, Keberlanjutan.

Abstract: This study aims to re-examine the concept of Community-Based Tourism (CBT) within the framework of sustainable development and social justice, as well as to explain the role of non-formal education in strengthening community capacity to independently manage community-based tourism. Employing a literature review method focusing on scholarly publications indexed within the last ten years, this research analyzes how CBT, non-formal education, and community empowerment are integrated into local development practices. The findings indicate that the success of CBT is strongly influenced by community participation, local governance structures, and socio-economic capacities enhanced through non-formal education. Moreover, the integration of these three components produces a more inclusive, adaptive, and sustainable model of local development. The study concludes that non-formal education serves as a strategic pillar that ensures sustainability and equity in CBT implementation.

Keywords: Community-Based Tourism, Nonformal Education, Community Empowerment, Sustainability.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:
Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Gedung O-1 Lantai 2 Jalan Lidah Wetan Sby
Kode Pos 60213
Telp. 031-7532160 Fax. 031-7532112
E-mail: jpus@unesa.ac.id

Pendahuluan

Pariwisata berbasis komunitas atau *Community-Based Tourism* (CBT) merupakan alternatif pengembangan pariwisata yang dianggap lebih menguntungkan masyarakat setempat dan menjamin keberlanjutan pariwisata (Nurhidayati, 2015). CBT telah diakui sebagai model pembangunan pariwisata yang berorientasi pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat lokal, dengan menempatkan komunitas sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat. CBT di Indonesia telah muncul sebagai model berkelanjutan dan inklusif yang secara aktif melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata, memastikan bahwa pariwisata selaras dengan nilai dan aspirasi komunitas, sehingga meminimalkan dampak negatif sambil memaksimalkan manfaat (Apriyanto. & Hamdany, 2025). CBT menawarkan alternatif terhadap pariwisata massal, dengan menekankan partisipasi

lokal, kontrol komunitas, pemerataan manfaat, pelestarian budaya dan lingkungan, serta tata kelola berbasis komunitas, bukan investor eksternal (Dangi & Jamal, 2016). Pendekatan ini tidak hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga mendorong pembangunan sosial, identitas lokal, dan kemandirian masyarakat. Terlebih di masa kini ketika isu keberlanjutan dan keadilan sosial menjadi pusat diskursus pembangunan global, integrasi prinsip keberlanjutan dan keadilan dalam CBT menjadi sangat (Dangi & Jamal, 2016). CBT diyakini mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pendapatan, mengurangi ketimpangan sosial, serta memperkuat identitas budaya dan kelestarian lingkungan.

Secara konsep, CBT mengedepankan prinsip partisipasi, kemandirian, keadilan distribusi manfaat, serta keberlanjutan sosial-ekologis (Hutagalung et al., 2025). (1) Prinsip artisipasi menjadi prinsip utama karena keterlibatan aktif masyarakat memungkinkan hadirnya keputusan yang lebih kontekstual, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan setempat, sehingga CBT memprioritaskan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam semua tahap mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Dengan partisipasi aktif masyarakat, setiap keputusan mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan konteks lokal (Ardianti & Eprilianto, 2020). Tanpa partisipasi yang bermakna, program CBT cenderung didominasi pihak luar dan tidak mencerminkan aspirasi komunitas. (2) prinsip kemandirian menegaskan pentingnya kemampuan komunitas untuk mengelola aset, mengorganisasi kegiatan wisata, serta mempertahankan operasional secara berkelanjutan tanpa ketergantungan berlebihan pada fasilitator eksternal. Prinsip ini berkaitan erat dengan penguatan kapasitas dan literasi masyarakat dalam bidang organisasi, ekonomi, dan keberlanjutan. Prinsip distribusi manfaat seharusnya menjadi kerangka kerja agar keuntungan ekonomi dari wisata tidak hanya dinikmati segelintir elit, tetapi dirasakan luas oleh anggota komunitas. Misalnya pada pengembangan desa wisata menunjukkan bahwa komunitas harus memiliki akses terhadap pengelolaan aset wisata, keterlibatan dalam usaha bersama, dan mekanisme pembagian hasil secara transparan aspek yang jika diabaikan dapat menimbulkan ketimpangan internal dan alienasi sosial (Raharjo & Wirahayu, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan distribusi manfaat menekankan bahwa keuntungan ekonomi dan sosial dari kegiatan pariwisata harus dirasakan secara merata oleh seluruh anggota komunitas, bukan hanya kelompok tertentu, sehingga tidak menimbulkan konflik, kecemburuan sosial, atau ketimpangan internal. (3) Prinsip keberlanjutan sosial-ekologis memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga harmoni sosial, budaya, serta nilai-nilai lokal. Implementasi CBT yang berhasil memperhatikan perlindungan lingkungan, konservasi budaya, dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, termasuk pengelolaan sampah, konservasi ekosistem, dan pelibatan komunitas dalam menjaga kelestarian (Alimi & Darwis, 2023). Dalam kerangka ini, CBT bukan hanya model ekonomi, tetapi juga pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan kepentingan ekologis, kesejahteraan komunitas, dan kelestarian budaya untuk jangka panjang.

Meskipun konsep CBT sedemikian menjanjikan, banyak inisiatif di lapangan menemui hambatan signifikan yang menghalangi transformasi konsep menjadi praktik pemberdayaan yang berkelanjutan. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas masyarakat baik dalam manajemen destinasi, layanan hospitabilitas, pemasaran, maupun tata kelola seringkali menjadi penghambat utama keberlanjutan CBT (Imbaya et al., 2019). Dalam studi di Kenya, misalnya, intervensi pembangunan kapasitas (*capacity building*) terhadap komunitas untuk mengembangkan CBT menunjukkan hasil yang kurang optimal: interaksi komunitas internal maupun eksternal minimal, sedikit peluang belajar bersama, serta visi kolektif dan kerja sama yang lemah (Imbaya et al., 2019). Selain itu, ketergantungan pada donor atau fasilitator eksternal dan kurangnya struktur kelembagaan yang kokoh menyebabkan ketika pendampingan berakhir, CBT sering kehilangan momentum, dimana program berhenti dan komunitas tidak mampu mempertahankannya secara mandiri. Masalah lain termasuk distribusi manfaat yang tidak merata, dominasi kelompok tertentu, serta keterbatasan literasi terkait prinsip keberlanjutan, konservasi, dan tata kelola yang adil ((Pasanchay & Schott, 2021); (Lee & Jan, 2019)). Oleh karena itu, banyak proyek CBT gagal memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan komunitas secara menyeluruh. Situasi tersebut memberikan sinyal bahwa potensi alam dan budaya saja tidak cukup sebagai fondasi, keberhasilan CBT sangat bergantung pada kapasitas manusia dan komunitas yang mencakup pengetahuan, keterampilan, literasi pariwisata dan keberlanjutan, kemampuan organisasi, dan kesadaran kolektif. Di sinilah peran pendidikan nonformal atau pendidikan masyarakat menjadi krusial.

Pendidikan nonformal menawarkan mekanisme fleksibel, kontekstual, dan partisipatif yang mampu meningkatkan literasi, membangun kapasitas lokal, serta memperkuat struktur kelembagaan komunitas tanpa terikat kurikulum formal (Vinodan & Meera, 2024). Empirisnya, program nonformal yang dirancang dengan baik misalnya workshop keberlanjutan, pelatihan manajemen destinasi, literasi lingkungan, pemasaran digital, dan pendampingan komunitas telah menunjukkan efek positif yang mampu

menciptakan peningkatan kesadaran lingkungan, pemahaman prinsip pariwisata berkelanjutan, peningkatan kemampuan teknis, dan keinginan komunitas untuk berbagi pengetahuan ke anggota lain, yang berpotensi menciptakan efek “bergelombang” dalam pemberdayaan komunitas (Queiros et al., 2025). Hasil semacam ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari strategi pemberdayaan komunitas melalui CBT. Pendekatan pendidikan nonformal juga menekankan pada pembelajaran orang dewasa (*adult learning*), yang memandang masyarakat sebagai pembelajar yang aktif, kritis, dan memiliki pengalaman yang dapat dijadikan modal sosial. Melalui proses belajar yang partisipatif, masyarakat tidak hanya menerima pengetahuan, melainkan mampu memberikan makna dan mengembangkan strategi mandiri untuk mengelola potensi wilayahnya. Pendekatan ini sangat relevan dengan prinsip CBT yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Dengan demikian, pendekatan yang menggabungkan CBT dan pendidikan nonformal secara sistematis melalui asesmen kebutuhan komunitas, pelatihan berbasis konteks lokal, pendampingan berkelanjutan, penguatan kelembagaan lokal, dan mekanisme distribusi manfaat yang adil merupakan wawasan penting dan rencana pemecahan masalah untuk mewujudkan CBT yang berkelanjutan, inklusif, dan memberdayakan ((Dangi & Jamal, 2016); (Imbaya et al., 2019); (Pasanchay & Schott, 2021); (Vinodan & Meera, 2024)). Model semacam itu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan eksternal dan memastikan komunitas benar-benar memiliki kontrol atas destinasi, proses, dan hasil pariwisata.

Berdasarkan kondisi dan wawasan tersebut, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis secara konseptual hubungan antara CBT dan pendidikan nonformal sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk: mengkaji ulang konsep CBT dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; mengeksplorasi peran pendidikan nonformal dalam memperkuat kapasitas komunitas untuk mengelola dan mempertahankan CBT secara mandiri; mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung integrasi pendidikan nonformal dalam praktik CBT; serta merumuskan kerangka konseptual rekomendatif yang menggabungkan CBT, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan nonformal sebagai strategi pembangunan lokal yang berkelanjutan. Penelitian ini berupaya untuk mengintegrasikan secara komprehensif dua disiplin kajian yang selama ini cenderung berjalan sendiri-sendiri, yaitu *community-based tourism* dan pendidikan nonformal, dalam satu kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat. Studi-studi mengenai CBT selama ini lebih banyak berfokus pada aspek pariwisata, ekonomi lokal, atau keberlanjutan, sedangkan penelitian pendidikan nonformal cenderung menekankan pada proses pembelajaran masyarakat tanpa mengaitkannya secara langsung dengan model pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lingkungan ((Ardianti & Eprilianto, 2020); (Raharjo & Wirahayu, 2025); (Suleman & Arsyad, 2024); (Khusnawati & Wahyudi, 2023)). Artikel ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan pendidikan nonformal sebagai komponen inti yang menghubungkan partisipasi, kapasitas komunitas, dan keberlanjutan CBT, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan CBT dalam konteks Indonesia. Pendekatan integratif seperti ini masih sangat terbatas dalam literatur nasional maupun global, sehingga memberikan kontribusi teoretis baru dalam ranah pendidikan masyarakat dan pembangunan berbasis komunitas.

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat strategis. Secara teoretis, artikel ini memperkaya khazanah keilmuan dengan menghadirkan kerangka konseptual yang menempatkan pendidikan nonformal sebagai elemen krusial dalam operasionalisasi CBT, sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian interdisipliner tentang pemberdayaan masyarakat. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah, pendamping desa, lembaga pemberdayaan, serta pengelola desa wisata mengenai bagaimana program pendidikan nonformal dapat dirancang dan diintegrasikan ke dalam pengembangan CBT untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih partisipatif serta berkelanjutan. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan pariwisata berbasis komunitas yang lebih adil, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*) untuk menganalisis keterkaitan antara *Community-Based Tourism* (CBT) dan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pendidikan nonformal. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengidentifikasi temuan-temuan empiris terbaru, menyusun pola konseptual, serta menemukan kesenjangan penelitian terkait implementasi CBT di Indonesia. Proses penelusuran literatur mengadaptasi alur SLR dengan menetapkan kata kunci seperti

community-based tourism, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan nonformal. Literatur kemudian ditelusuri melalui Google Scholar dengan kriteria inklusi: (1) terbit dalam 10 tahun terakhir; (2) artikel ilmiah yang melalui proses *peer-review*; dan (3) relevan dengan topik pariwisata berbasis komunitas dan pendidikan masyarakat. Langkah seleksi dilakukan melalui penyaringan judul, abstrak, serta full-text, kemudian dikategorikan berdasarkan tema analitis. Metode SLR ini sejalan dengan praktik yang telah diterapkan dalam penelitian Ilhami & Saladin (2021) yang menyatakan bahwa kajian sistematis mampu menyajikan pemetaan komprehensif mengenai hubungan CBT dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan serupa juga digunakan oleh Permadi et al. (2025) yang menegaskan bahwa SLR efektif untuk mengidentifikasi strategi dan pola pemberdayaan dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Selain itu, Yustakim & Hos (2025) membuktikan bahwa kajian literatur sistematis memungkinkan analisis mendalam terhadap strategi penguatan kapasitas komunitas pengelola wisata, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi interpretasi teoretik dan rekomendasi konseptual penelitian. Dalam penelitian ini, seluruh literatur dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik, untuk menemukan tema utama seperti partisipasi masyarakat, *capacity building*, kemandirian komunitas, dan integrasi pendidikan nonformal dalam konteks CBT, sehingga menghasilkan sintesis teoretis yang lebih komprehensif dan relevan bagi pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian literatur disusun menurut enam tema utama yang langsung menjawab tujuan penelitian: (1) rekonseptualisasi CBT dalam kerangka pembangunan berkelanjutan & keadilan sosial; (2) peran pendidikan nonformal sebagai mekanisme penguatan kapasitas; (3) desain dan praktik pendidikan nonformal yang efektif untuk CBT; (4) hambatan struktural dan lokal serta faktor pendorong integrasi pendidikan nonformal; (5) dampak multidimensi CBT yang terintegrasi; dan (6) kerangka konseptual rekomendatif.

1. Rekonseptualisasi CBT dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial

Literatur modern mempertegas bahwa CBT bukan sekadar strategi pemasaran destinasi, melainkan model pembangunan lokal yang harus menggabungkan tujuan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. CBT mampu memperkuat ketahanan sosial-ekologis komunitas dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas wisata dan konservasi lingkungan, sehingga mendorong praktik keberlanjutan jangka panjang (Suleman & Arsyad, 2024). Studi di wilayah pedesaan dan desa wisata menunjukkan bahwa penerapan CBT yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif tidak hanya meningkatkan pendapatan lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan solidaritas sosial (Asmara et al., 2024). Artinya dengan membangun mekanisme partisipatif dan tata kelola komunitas yang inklusif, CBT membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta memperoleh manfaat ekonomi secara lebih adil yang merupakan suatu wujud keadilan sosial yang seringkali tidak tercapai dalam model pariwisata massal (Khusnawati & Wahyudi, 2023). Ketika CBT dipadukan dengan program pendidikan nonformal berupa pelatihan teknis, pendampingan organisasi, dan literasi pemasaran digital, dampaknya bukan hanya peningkatan layanan pariwisata tetapi juga peningkatan kapasitas komunitas untuk mengelola destinasi secara mandiri dan berkelanjutan (Widyaningsih, 2020).

Studi konseptual menyatakan CBT idealnya menekankan partisipasi masyarakat, kontrol lokal, dan pemerataan manfaat, sehingga relevan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial ((Dangi & Jamal, 2016); (Pasanchay & Schott, 2021)). Partisipasi masyarakat relevan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan, kapasitas, dan nilai-nilai komunitas yang terdampak secara langsung. Dengan keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengelolaan, setiap aktivitas wisata dapat diselaraskan dengan kemampuan lingkungan lokal untuk pulih, sehingga mengurangi risiko eksplorasi sumber daya dan kerusakan ekologis. Selain itu, ketika masyarakat diberi ruang untuk berperan dalam pengambilan keputusan, distribusi manfaat ekonomi menjadi lebih merata dan tidak terpusat hanya pada elite lokal atau pihak luar. Mekanisme partisipatif juga memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*), yang mendorong masyarakat menjaga keberlanjutan destinasi sekaligus memastikan keberlanjutan intergenerasi. Keterlibatan aktif komunitas ini akhirnya menciptakan struktur tata kelola yang lebih inklusif dan responsif, yang merupakan esensi dari keadilan sosial dalam pembangunan berbasis masyarakat. Penelitian empiris nasional menunjukkan variasi implementasi, dimana beberapa desa wisata berhasil meningkatkan pendapatan lokal dan memperkuat kohesi sosial jika kontrol komunitas kuat, tetapi banyak pula kasus di mana manfaat

ekonomi terdistribusi tidak merata dan kewenangan digeser ke aktor eksternal ((Raharjo & Wirahayu, 2025); (Ardianti & Eprilianto, 2020)). Analisis ini menggarisbawahi bahwa untuk memenuhi ambisi keberlanjutan dan keadilan sosial, CBT harus dipandang sebagai proses institusional yang memerlukan aturan main (*governance*), mekanisme pembagian manfaat, dan indikator sosial dan ekologis bukan hanya aktivitas wisata semata. Hal ini berarti bahwa pengelolaan CBT tidak cukup mengandalkan kreativitas komunitas dalam menawarkan paket wisata, tetapi harus memastikan adanya struktur kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pendekatan institusional memungkinkan komunitas memiliki landasan yang jelas dalam mengatur hak akses, kepemilikan sumber daya, serta pola kerjasama dengan pihak eksternal sehingga menghindari praktik eksklusivitas dan dominasi aktor tertentu. Selain itu, keberadaan mekanisme pembagian manfaat yang adil memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan rumah tangga miskin juga memperoleh manfaat ekonomi maupun sosial dari kegiatan wisata. Integrasi indikator sosial-ekologis yang terukur membantu komunitas memantau dampak jangka panjang sehingga pengembangan wisata tidak melampaui daya dukung lingkungan dan tetap menjaga kohesi sosial. Dengan demikian, inti dari rekonseptualisasi CBT adalah memposisikan pariwisata berbasis komunitas bukan sebagai produk, tetapi sebagai model tata kelola lokal yang berorientasi pada keberlanjutan ekologis, pemberdayaan struktural, dan distribusi manfaat yang adil bagi seluruh anggota komunitas.

2. Peran pendidikan nonformal sebagai mekanisme penguatan kapasitas komunitas

Pendidikan nonformal sejatinya merupakan jalur pendidikan yang diselenggrakan di luar sistem pendidikan persekolahan yang berorientasi pada pemberian layanan Pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap yang dapat menjadi alternatif dari pendidikan formal dan mengambil peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia (Abdullahi et al., 2023). Pendidikan nonformal merupakan faktor mediator strategis yang mampu mengubah potensi sumber daya lokal menjadi kapabilitas komunitas yang nyata dan produktif serta bertumpu pada jaringan dan solidaritas komunitas (Qodriyati et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Nonformal tidak hanya berfungsi sebagai wahana transfer keterampilan teknis, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kapabilitas sosial melalui pembelajaran kolaboratif dan berbasis pengalaman. Berbagai bentuk Pendidikan Nonformal seperti pelatihan teknis (*hospitality, guiding*), manajerial (pencatatan, pengelolaan kas), pemasaran (*storytelling* dan *digital marketing*), maupun pendidikan lingkungan (konservasi dan pengelolaan sampah) menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesiapan komunitas mengelola destinasi wisata berbasis komunitas. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Vinodan & Meera (2024) serta (2025) yang menunjukkan bahwa pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan komunitas dapat memperkuat daya saing destinasi sekaligus meningkatkan ketahanan sosial-ekologis. Dalam konteks Indonesia, studi Khusnawati & Wahyudi (2023) dan Jaya (2024) mengonfirmasi bahwa penggunaan metode andragogi serta pendekatan *learning-by-doing* dalam proses pelatihan memperkuat keterlibatan warga dan meningkatkan kemungkinan adopsi praktik pengelolaan wisata yang lebih profesional. Oleh karena itu, pendidikan nonformal dapat dipandang sebagai ruang pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan lokal dengan inovasi baru yang relevan bagi penguatan CBT. Secara keseluruhan, Pendidikan Nonformal berperan penting sebagai jembatan antara kebutuhan pengembangan komunitas dan dinamika pariwisata berkelanjutan.

Penelitian empiris di berbagai desa wisata di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan nonformal bekerja melalui tiga mekanisme fundamental dalam memperkuat CBT. Pertama, pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi teknis terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan *homestay, guiding*, dan atraksi budaya, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat (Ardianti & Eprilianto, 2020). Kedua, pendidikan nonformal berkontribusi pada penguatan tata kelola lokal, terutama melalui pelatihan manajemen organisasi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan, yang mendorong tumbuhnya kepercayaan sosial di antara anggota komunitas. Ketiga, pendidikan nonformal berperan dalam mendorong perubahan norma sosial, khususnya melalui pendidikan lingkungan dan konservasi yang menumbuhkan perilaku kolektif dalam menjaga keberlanjutan alam sebagai basis utama daya tarik wisata. Studi evaluatif oleh (Jaya, 2024) menegaskan bahwa efektivitas ketiga mekanisme tersebut sangat bergantung pada durasi program pelatihan serta keberadaan pendampingan pasca-pelatihan agar keterampilan benar-benar terimplementasi menjadi praktik nyata. Dengan demikian, pendidikan nonformal tidak hanya meningkatkan kualitas modal manusia, tetapi juga memperkuat modal sosial dan regulatif yang menjadi inti tata kelola CBT. Ketiga mekanisme ini juga menjelaskan bagaimana

Pendidikan nonformal menjadi pilar strategis dalam memastikan keberlanjutan jangka panjang dari model pariwisata berbasis komunitas.

Ditinjau perspektif operasional, penelitian terbaru menunjukkan bahwa program pendidikan nonformal yang efektif harus dirancang berbasis kebutuhan konkret komunitas dan terintegrasi dengan sistem pendampingan yang kuat. Hal ini mencakup asesmen kebutuhan secara partisipatif, penyediaan pelatihan berbasis praktik seperti simulasi pemanduan wisata dan praktik pengelolaan *homestay*, serta penyediaan mentoring jangka panjang untuk memastikan transfer keterampilan yang berkelanjutan (Permadi et al., 2025). Selanjutnya, Yustakim & Hos (2025) menekankan bahwa dukungan kelembagaan dari pemerintah desa, dinas pariwisata, maupun lembaga pendidikan masyarakat menjadi faktor kunci untuk menjaga konsistensi pembelajaran dan kualitas layanan wisata. Selain itu, pendidikan nonformal perlu diposisikan sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran komunitas yang terus-menerus, bukan sebagai intervensi jangka pendek yang berorientasi pada proyek. Pendekatan ini memungkinkan komunitas memperkuat kapasitas mereka secara mandiri sehingga mampu menghadapi tantangan persaingan destinasi, fluktuasi kunjungan wisatawan, maupun isu keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, inti pemaknaan ulang peran pendidikan nonformal dalam konteks CBT terletak pada bagaimana pendidikan masyarakat menjadi motor penggerak penguatan kapasitas kelembagaan, profesionalisasi layanan wisata, dan internalisasi nilai keberlanjutan di tingkat komunitas. Rekonseptualisasi ini menegaskan bahwa keberhasilan CBT sangat bergantung pada konsistensi proses belajar masyarakat sebagai fondasi utama tata kelola pariwisata berkelanjutan.

3. Desain dan praktik pendidikan nonformal yang efektif untuk CBT

Desain pendidikan nonformal yang efektif dalam konteks Community-Based Tourism (CBT) harus dibangun atas dasar prinsip partisipatif, kontekstual, modular, dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif penting karena melibatkan masyarakat sejak proses identifikasi kebutuhan, penyusunan kurikulum, hingga evaluasi, sehingga menghasilkan materi belajar yang benar-benar relevan dan meningkatkan rasa kepemilikan peserta (Zainal et al., 2024). Kontekstualitas juga menjadi syarat utama mengingat dinamika setiap destinasi wisata berbeda dan sangat dipengaruhi oleh budaya, kearifan lokal, serta struktur ekonomi setempat; materi pelatihan yang tidak mengindahkan hal ini biasanya gagal diadopsi oleh komunitas (Ngo & Creutz, 2022). Modularitas memudahkan kelas pelatihan disesuaikan dengan kesiapan peserta, memungkinkan tahapan belajar yang runut mulai dari penguasaan teknis dasar hingga keterampilan manajerial dan pemasaran (Muchlis et al., 2024). Terakhir, keberlanjutan program menuntut adanya mekanisme tindak lanjut seperti mentoring dan pelatihan lanjutan dalam bentuk *training-of-trainers* (ToT) agar kapasitas komunitas semakin mandiri dan tidak bergantung pada fasilitator eksternal (Susanto et al., 2022). Dengan demikian, desain PNF untuk CBT harus menggabungkan struktur yang fleksibel namun konsisten, serta berorientasi jangka panjang.

Implementasi PNF untuk penguatan CBT memerlukan metode pembelajaran yang dinamis, aplikatif, dan adaptif terhadap karakteristik masyarakat. Pendekatan *learning-by-doing* terbukti menjadi strategi paling efektif karena peserta dapat langsung mempraktikkan materi, seperti simulasi pelayanan homestay, penyusunan paket wisata, atau pengelolaan keuangan kelompok; langkah ini mempercepat proses internalisasi keterampilan (Muchlis et al., 2024). Integrasi pengalaman lokal sebagai studi kasus juga memperkuat efektivitas pelatihan karena peserta belajar melalui situasi nyata yang mereka kenal. Selain itu, metode *blended learning* yang menggabungkan tatap muka dan materi digital sederhana berbasis *smartphone* memungkinkan pelatihan tetap berlangsung meski peserta memiliki waktu terbatas atau berada di daerah dengan akses terbatas (Susanto et al., 2022). Model ToT selanjutnya diperlukan untuk memperluas dampak pelatihan secara horizontal di tingkat komunitas, karena anggota yang telah ahli dapat menjadi mentor lokal yang melanjutkan transfer pengetahuan secara berkelanjutan. Pola implementasi seperti ini menjadikan pendidikan nonformal lebih adaptif sekaligus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat wisata.

Substansi penting dari PNF yang efektif adalah kemampuannya menggabungkan pengetahuan lokal dengan inovasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan CBT. Penelitian menunjukkan bahwa ketika nilai, tradisi, dan praktik budaya lokal dijadikan bagian inti, misalnya kurikulum pada pelatihan interpretasi budaya, kerajinan tradisional, atau pengelolaan ritual adat sehingga program pelatihan lebih mudah diterima dan menghasilkan diferensiasi destinasi yang berkelanjutan (Zainal et al., 2024). Integrasi ini mendorong peserta untuk tidak hanya mempertahankan warisan lokal, tetapi juga mengadaptasikannya dengan kebutuhan pasar wisata, misalnya melalui *storytelling*, *packaging* produk, atau desain pengalaman wisata yang unik. Di sisi lain, inovasi berbasis teknologi seperti pemasaran digital, manajemen reservasi,

dan literasi digital perlu diperkenalkan secara bertahap berdasarkan kondisi literasi peserta. Kombinasi antara kearifan lokal dan inovasi memungkinkan komunitas melihat hubungan yang jelas antara identitas budaya mereka dengan peluang ekonomi, sehingga meningkatkan motivasi untuk mengelola CBT secara lebih profesional. Dengan demikian, pendidikan nonformal berperan sebagai jembatan yang menghubungkan tradisi dengan transformasi ekonomi yang lebih inklusif.

Pendidikan nonformal yang efektif tidak hanya mentransfer keterampilan teknis, tetapi juga memberikan dukungan struktural yang memungkinkan peserta menerapkan apa yang dipelajari. Pelatihan pemasaran digital berbasis *platform* sederhana seperti *WhatsApp Business*, *Instagram* dasar, dan *marketplace* lokal telah terbukti meningkatkan visibilitas produk komunitas dan mendorong pertumbuhan pemesanan dalam waktu relatif singkat (Muchlis et al., 2024). Namun, pelatihan saja tidak cukup, komunitas membutuhkan akses terhadap modal mikro, peralatan, atau dukungan awal untuk menguji inovasi yang mereka pelajari. Penelitian menunjukkan bahwa komunitas yang memperoleh kombinasi pelatihan dan dukungan modal lebih cepat menerapkan pengetahuan baru dibandingkan mereka yang hanya menerima pelatihan (Saragih & Karunia, 2025). Oleh karena itu, desain pendidikan nonformal idealnya terintegrasi dengan kebijakan BUMDes, koperasi lokal, atau lembaga keuangan mikro agar peserta dapat membangun usaha wisata berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan terintegrasi inilah yang memastikan bahwa pendidikan nonformal bukan sekadar proses belajar, melainkan bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan dalam pengembangan CBT.

4. Hambatan struktural dan lokal serta faktor pendorong integrasi pendidikan nonformal

Meskipun potensi CBT cukup besar untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan komunitas, kajian empiris menunjukkan adanya hambatan ganda yang bersifat eksternal dan internal. Hambatan eksternal mencakup keterbatasan sumber pembiayaan untuk pengembangan fasilitas dasar (misalnya *homestay*, infrastruktur sanitasi), akses pasar yang terbatas akibat kurangnya jaringan pemasaran, serta kebijakan lokal yang belum berpihak pada pemberdayaan komunitas. Penelitian tentang peran BUMDes dalam pemberdayaan pariwisata menunjukkan bahwa kelembagaan desa yang lemah dan kurangnya sinergi antar-pemangku kepentingan menyebabkan program CBT sulit berkelanjutan dan rawan terhenti ketika sumber dana eksternal hilang (Anshori & Enceng, 2024). Hal ini terjadi karena struktur organisasi BUMDes yang tidak kuat membuat proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan distribusi tugas tidak berjalan efektif, sehingga program tidak memiliki fondasi manajerial yang kokoh untuk bertahan secara mandiri. Selain itu, ketika tidak ada koordinasi dan kolaborasi yang jelas antara pemerintah desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaku usaha, dan masyarakat umum, maka setiap aktor bekerja secara terpisah sehingga upaya pengembangan wisata berbasis komunitas menjadi tidak terarah, tidak terintegrasi, dan rentan gagal dalam jangka panjang. Selain itu, kajian sistematis lainnya menegaskan bahwa ketiadaan kebijakan terintegrasi lintas-sektor (pariwisata, pendidikan, ekonomi mikro) seringkali membuat intervensi menjadi parsial dan kurang berdampak (Sumandi & Rizkikadduhani, 2024). Ketiadaan kebijakan terpadu menyebabkan setiap sektor bekerja dengan prioritasnya masing-masing tanpa mekanisme koordinasi yang memastikan bahwa program pelatihan, penguatan ekonomi, dan pengembangan destinasi saling mendukung. Akibatnya, intervensi yang dilakukan sering hanya menyelesaikan sebagian kecil masalah, misalnya peningkatan kapasitas melalui pelatihan namun tidak memiliki dukungan struktural seperti akses modal, pemasaran, atau perbaikan tata kelola, sehingga dampak jangka panjangnya menjadi terbatas.

Di tingkat komunitas, hambatan internal seringkali berkaitan dengan keterbatasan kapasitas manusia dan dinamika sosial. Kurangnya literasi digital dan keterampilan pemasaran *online* terutama di kalangan pengelola *homestay* perempuan akhirnya membatasi kemampuan komunitas untuk mengakses pasar yang lebih luas, sehingga potensi pendapatan tidak optimal (Ismail & Sari, 2024). Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu: 1) banyak pengelola *homestay* belum familiar dengan penggunaan *platform* promosi digital seperti media sosial, website pemesanan, atau aplikasi perjalanan sehingga visibilitas usaha mereka tetap rendah; 2) keterbatasan kemampuan dalam membuat konten digital seperti foto berkualitas, deskripsi layanan yang menarik, atau testimoni pelanggan sehingga mengurangi daya tarik homestay di mata calon wisatawan; dan 3) minimnya pemahaman tentang strategi pemasaran online, seperti penetapan harga dinamis, promosi musiman, atau manajemen ulasan, membuat homestay sulit bersaing dengan penyedia akomodasi lain yang lebih profesional. Selain itu beberapa faktor lainnya seperti konflik internal, *elite capture* atau fragmentasi kepemimpinan lokal dapat menghambat distribusi manfaat dan mengurangi tingkat partisipasi yang bermakna. Konflik internal sering muncul karena perbedaan kepentingan atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan program, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan

dan mengurangi efektivitas kegiatan komunitas. *Elite capture* terjadi ketika sejumlah tokoh atau pihak yang memiliki kekuasaan lokal mendominasi akses terhadap sumber daya atau manfaat program, sehingga kelompok lain terutama perempuan, pemuda, atau warga miskin tidak mendapatkan porsi manfaat yang adil. Fragmentasi kepemimpinan lokal dapat menyebabkan koordinasi yang lemah antar kelompok atau antar pemangku kepentingan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi dangkal, tidak inklusif, dan tidak menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Studi kasus menunjukkan bahwa ketika kepemimpinan lokal terpusat pada sejumlah aktor, manfaat ekonomi cenderung terkonsentrasi dan motivasi masyarakat lain menurun, sehingga keberlanjutan program menjadi rapuh (Musdah et al., 2024).

Meski terdapat hambatan nyata, literatur juga mengidentifikasi faktor pendukung yang konsisten meningkatkan peluang keberhasilan integrasi pendidikan nonformal ke dalam CBT. Pertama, pendampingan intensif dan mentoring jangka panjang, bukan pelatihan singkat sekali jalan. Hal ini terbukti memperbesar peluang adopsi praktik baru oleh komunitas, misalnya program-program yang menggabungkan ToT menciptakan kapasitas lokal yang dapat berlanjut tanpa ketergantungan penuh pada fasilitator eksternal (Pane et al., 2025). Kedua, dukungan kebijakan lokal dan mekanisme pembiayaan desa (misalnya alokasi dana desa yang diarahkan untuk pengembangan kapasitas dan modal awal) menjadi katalis sehingga hasil pelatihan dapat langsung diuji dan diintegrasikan ke usaha riil (Anshori & Enceng, 2024). Ketiga, akses ke jaringan pemasaran dan kemitraan, baik dengan agen perjalanan, platform digital, maupun BUMDes atau BUMN lokal dapat mempercepat arus permintaan sehingga usaha *homestay* dan produk lokal mendapat pasar yang stabil (Sumandi & Rizkikadduhani, 2024). Strategi paling efektif menurut bukti empiris adalah intervensi kombinasi pendidikan nonformal yang dirancang partisipatoris dan kontekstual, dipadu pendampingan jangka panjang, dikoneksikan dengan akses modal mikro, dan difasilitasi oleh lembaga lokal yang kuat (BUMDes, Pokdarwis, koperasi). Sebagai contoh, program yang memasangkan pelatihan pemasaran digital dengan akses microfinance dan mentoring lapangan menunjukkan peningkatan permintaan dan pendapatan yang lebih cepat dibanding intervensi tunggal (Saragih & Karunia, 2025). Dengan kata lain, integrasi lintas-sektor (pendidikan, ekonomi mikro, kelembagaan desa, pemasaran) dan komitmen dukungan jangka panjang dari pemangku kepentingan lokal dan regional merupakan prasyarat agar pendekatan nonformal benar-benar menumbuhkan kemandirian komunitas dalam menerapkan dan mempertahankan CBT yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Dampak multidimensi CBT yang terintegrasi

Penerapan *Community-Based Tourism* yang terintegrasi menunjukkan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, pembukaan peluang kerja, dan diversifikasi sumber pendapatan komunitas. Studi nasional di Desa Wisata Hijau Bilebante dan Desa Wisata Nglanggeran menemukan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam penyediaan jasa *homestay*, guiding, kuliner lokal, dan produk kreatif terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga serta perputaran ekonomi lokal ((Kamila & Sutanto, 2025); (Jamalina & Wardani, 2017)). Temuan ini sejalan dengan penelitian internasional oleh Seraphin (2018) yang menunjukkan bahwa CBT memaksimalkan distribusi manfaat ekonomi ketika komunitas memiliki kontrol penuh atas rantai nilai pariwisata. Selain itu, Goodwin & Santilli (2009) menegaskan bahwa CBT yang dikelola secara inklusif tidak hanya meningkatkan penghasilan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal melalui penciptaan usaha mikro berbasis budaya dan lingkungan. Dengan demikian, integrasi CBT dalam konteks pembangunan lokal menjadi motor penting bagi kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang menggantungkan hidup pada sektor informal. Integrasi CBT dalam konteks pembangunan lokal menjadi motor penting bagi kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang menggantungkan hidup pada sektor informal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas individu dalam mengelola potensi lokal, tetapi juga mendorong munculnya inovasi usaha yang berbasis pada kebutuhan dan kekuatan komunitas itu sendiri. Melalui proses pemberdayaan yang partisipatif, masyarakat menjadi lebih percaya diri dalam mengidentifikasi peluang ekonomi baru dan meminimalkan ketergantungan pada pihak luar. Selain itu, penguatan jejaring sosial antarwarga serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal turut mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Pada aspek sosial dan kultural, CBT mendorong pelestarian budaya dan penguatan modal sosial masyarakat melalui revitalisasi tradisi, penguatan identitas lokal, dan peningkatan interaksi antarwarga. Studi nasional oleh Tohopi et al. (2025) dan Herlianti dan Sanjaya (2022) menunjukkan bahwa pariwisata berbasis komunitas menyediakan ruang bagi generasi muda untuk belajar dan melestarikan ritual budaya,

seni pertunjukan, serta kearifan lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata. Secara internasional, kajian (Kontogeorgopoulos & Churyen (2014) menunjukkan bahwa CBT tidak hanya melindungi budaya lokal, tetapi juga memungkinkan terjadinya *cultural negotiation*, yaitu proses dialog antara komunitas dan wisatawan yang memperkuat nilai-nilai lokal tanpa menjadikannya komoditas semata. Penelitian Rasoolimanesh et al (2015) juga menegaskan bahwa modal sosial komunitas termasuk kepercayaan, solidaritas, dan kohesi dapat meningkat ketika komunitas memegang peran utama dalam pengelolaan destinasi. Dengan demikian, CBT berperan penting dalam memperkuat identitas budaya, meminimalkan konflik sosial, dan menumbuhkan rasa memiliki yang lebih besar terhadap aset lokal. CBT mampu memperkuat identitas budaya karena pendekatan ini menempatkan nilai-nilai lokal sebagai pusat pengembangan, sehingga masyarakat dapat mempertahankan tradisi yang selama ini menjadi perekat sosial. Proses pelibatan warga dalam setiap tahap perencanaan dan pengelolaan juga membantu meminimalkan konflik sosial, karena keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan bersama. Ketika masyarakat menjadi bagian langsung dari proses pengembangan, rasa memiliki terhadap aset budaya dan destinasi lokal pun meningkat secara signifikan. Selain itu, partisipasi ini menciptakan mekanisme perlindungan sosial di mana komunitas merasa berkewajiban menjaga, merawat, dan mengembangkan potensi mereka secara berkelanjutan.

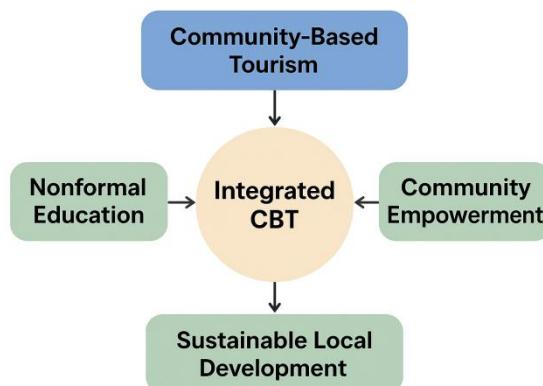
Dari perspektif lingkungan, CBT yang dirancang terintegrasi menjadi instrumen konservasi alam dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Studi Tohopi et al. (2025) dan Fionasari (2024) menunjukkan bahwa praktik seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, pembatasan jumlah wisatawan, dan konservasi habitat alam dapat mengurangi tekanan ekologis di destinasi wisata pedesaan. Hal ini konsisten dengan temuan Giampiccoli & Saayman (2018) yang menegaskan bahwa CBT dapat menjadi bentuk ekowisata yang efektif ketika komunitas memiliki kapasitas ekologis yang memadai dan struktur tata kelola lingkungan yang kuat. Selain itu, Stone et al. (2022) menambahkan bahwa keberhasilan CBT dalam menjaga keberlanjutan lingkungan bergantung pada pendidikan lingkungan, regulasi lokal, dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pemantauan daya dukung destinasi. Oleh karena itu, CBT tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan ekologis dan ekologis jangka panjang destinasi wisata. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pengelola utama, CBT mendorong penerapan praktik wisata yang lebih ramah lingkungan karena warga lokal memiliki kepentingan langsung terhadap kelestarian sumber daya alam mereka. Pendekatan ini juga memungkinkan penerapan regulasi internal komunitas seperti pembatasan jumlah wisatawan atau zonasi konservasi yang sering kali lebih efektif dibanding aturan eksternal. Selain itu, keuntungan ekonomi yang diperoleh dari CBT dapat dialokasikan kembali untuk kegiatan restorasi lingkungan, pendidikan konservasi, atau pengembangan infrastruktur hijau. Dengan demikian, seluruh proses pengelolaan CBT menciptakan sebuah siklus berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian ekosistem.

Pada aspek keberlanjutan komunitas secara menyeluruh, CBT yang terintegrasi menjadi strategi pembangunan lokal yang holistik, menggabungkan prinsip pemberdayaan, partisipasi, dan keadilan distribusi manfaat. Studi nasional oleh Herlianti dan Sanjaya (2022) serta penelitian Fionasari (2024) menunjukkan bahwa kapasitas komunitas meningkat ketika mereka terlibat dalam pengambilan keputusan, manajemen destinasi, dan pembagian manfaat ekonomi secara transparan. Bukti internasional dari Salazar (2020) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan jangka panjang pariwisata berbasis komunitas membutuhkan struktur tata kelola yang demokratis, partisipatif, dan inklusif. Selain itu, integrasi CBT dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seperti SDG 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif), SDG 11 (komunitas berkelanjutan), dan SDG 15 (pelestarian ekosistem darat), semakin mempertegas bahwa CBT adalah instrumen pembangunan lokal yang tidak hanya menguntungkan masyarakat hari ini, tetapi juga relevan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, dampak multidimensional CBT yang terintegrasi bukan sekadar kontribusi sektor wisata, tetapi menjadi kerangka pembangunan lokal yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan multidimensional dalam CBT memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak, melainkan didistribusikan secara merata melalui mekanisme pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Selain itu, dimensi sosial diperkuat melalui peningkatan kohesi komunitas, pelestarian identitas budaya, dan terbukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi kelompok perempuan, pemuda, serta kelompok rentan. Dari sisi lingkungan, integrasi prinsip konservasi memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak merusak ekosistem lokal, melainkan mendorong praktik-praktik ekologis yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, CBT tidak hanya membangun sektor wisata yang menguntungkan, tetapi juga

menjadi instrumen pembangunan lokal yang menyatu dengan prinsip keadilan sosial, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.

6. Kerangka konseptual rekomendatif

Kerangka konseptual integratif ini menempatkan CBT sebagai arena transformasi sosial-ekonomi berbasis komunitas yang diperkuat melalui pendidikan nonformal dan menghasilkan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Hubungan antarunsur berlangsung secara dinamis, saling menguatkan, dan tidak bersifat linear, melainkan membentuk suatu ekosistem pembelajaran sosial (*social learning ecosystem*) di tingkat lokal. Dengan demikian, CBT bukan hanya model wisata berbasis komunitas, tetapi juga mekanisme pembangunan lokal yang memadukan dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dalam kerangka keberlanjutan yang berkeadilan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Rekomendatif

a. CBT sebagai Arena Ekonomi-Sosial yang Dikelola Komunitas

CBT menyediakan konteks di mana masyarakat dapat mengelola sumber daya lokal secara langsung untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial. Dalam mekanisme ini, komunitas menjadi aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan distribusi keuntungan sehingga tercipta ruang partisipasi yang luas. Selain itu, CBT memungkinkan masyarakat menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi lokal sebagai daya tarik wisata, sambil memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak identitas dan struktur sosial yang ada. CBT juga menciptakan kesempatan kerja baru, memperkuat jejaring sosial, dan meningkatkan posisi tawar masyarakat terhadap stakeholder eksternal seperti pemerintah dan pelaku industri. Dengan demikian, CBT berfungsi sebagai platform integratif yang menggabungkan nilai ekonomi dengan fungsi sosial komunitas.

b. Pendidikan Nonformal sebagai Mekanisme Peningkatan Kapasitas

Pendidikan nonformal memainkan peran strategis sebagai sarana peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata berbasis komunitas. Melalui pelatihan, workshop, pendampingan, dan pembelajaran berbasis praktik, masyarakat memperoleh keterampilan teknis (seperti pelayanan wisata, pengelolaan homestay, pemasaran digital), keterampilan manajerial (seperti tata kelola kelembagaan, penyusunan rencana usaha, dan analisis risiko), serta pengetahuan ekologis yang mendukung konservasi lingkungan. Proses pendidikan nonformal juga mendorong pembelajaran kolaboratif yang memperkuat modal sosial komunitas melalui kerja sama, berbagi pengalaman, dan pemecahan masalah secara kolektif. Dengan kapasitas yang meningkat, masyarakat dapat mengelola CBT secara lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pasar maupun tantangan lingkungan. Pendidikan nonformal dengan demikian menjadi fondasi untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat keberlanjutan sosial dan institusional CBT.

c. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Transformasi Sosial

Pemberdayaan dalam konteks CBT merupakan proses transformasional yang memperkuat posisi masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan pemilik manfaat pembangunan. Proses ini tidak hanya mencakup kemampuan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kepercayaan diri, kemampuan negosiasi, kontrol atas sumber daya, dan kapasitas untuk mengorganisir diri. Pemberdayaan memungkinkan masyarakat mengambil keputusan yang lebih otonom terkait pengelolaan aset lokal, menentukan arah pengembangan pariwisata, dan memastikan distribusi manfaat yang adil. Selain itu,

pemberdayaan menciptakan struktur kelembagaan yang inklusif, membuka partisipasi bagi kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok marginal yang seringkali tidak terlibat dalam proses pembangunan. Pada tahap ini, masyarakat bukan lagi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang aktif, kritis, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah pembangunan jangka panjang.

d. Integrasi Ketiga Komponen Menuju Pembangunan Lokal Berkelanjutan

Ketiga komponen CBT, pendidikan nonformal, dan pemberdayaan saling bersinergi membentuk fondasi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. CBT menyediakan arena sekaligus kebutuhan akan kapasitas; pendidikan nonformal menyediakan mekanisme penguatan kapasitas tersebut; dan pemberdayaan menjadi dampak transformasional yang memastikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis. Integrasi ini menghasilkan model pembangunan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan distributif, pelestarian budaya, serta perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan berbasis CBT bukan hanya menumbuhkan sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, memastikan keberlanjutan ekologi, dan menciptakan tata kelola yang inklusif serta berkeadilan. Kerangka ini menunjukkan bahwa keberhasilan CBT tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan dan pemberdayaan yang berkelanjutan di dalam komunitas.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa *Community-Based Tourism* (CBT) merupakan pendekatan pembangunan lokal yang tidak hanya relevan, tetapi juga strategis dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan CBT sangat bergantung pada sejauh mana prinsip partisipasi, kontrol lokal, keberlanjutan ekologis, dan pemerataan manfaat diterapkan secara konsisten. Rekonseptualisasi CBT sebagai proses institusional menempatkan komunitas sebagai aktor utama yang memiliki kapasitas untuk mengatur, mengawasi, dan memanfaatkan sumber daya lokal sesuai kepentingannya, sehingga CBT menjadi lebih dari sekadar aktivitas wisata melainkan instrumen transformasi sosial dan ekonomi berbasis komunitas. Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan nonformal memiliki peran signifikan dalam memperkuat kompetensi komunitas untuk mengelola CBT secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui pelatihan, pendampingan, dan pembelajaran berbasis praktik, masyarakat memperoleh pengetahuan teknis, manajerial, ekologis, serta keterampilan sosial yang memperkuat tata kelola komunitas. Integrasi pendidikan nonformal dalam praktik CBT juga berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan yang mampu membuka ruang partisipasi yang lebih luas, meningkatkan kapabilitas individual maupun kolektif, dan memperkuat daya adaptasi komunitas terhadap tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dengan demikian, pendidikan nonformal bukan hanya pendukung teknis, tetapi fondasi struktural yang memastikan keberlanjutan institusional CBT.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan CBT, pendidikan nonformal, dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan lokal yang berkelanjutan. Kerangka ini menekankan bahwa keberhasilan CBT memerlukan pendekatan yang holistik melalui penguatan kapasitas komunitas, pengembangan mekanisme tata kelola yang partisipatif, serta penyusunan indikator sosial-ekologis untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Pokok pikiran baru yang muncul dari penelitian ini ialah bahwa keberlanjutan dalam CBT bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi atau konservasi, tetapi oleh kualitas proses pembelajaran sosial dan pemberdayaan komunitas yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, pengembangan CBT ke depan harus menempatkan pendidikan nonformal dan pemberdayaan sebagai pilar utama agar mampu berfungsi sebagai strategi pembangunan lokal yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Abdullahi, M., Rahmawati, R., & Ridwan, I. (2023). Pemberdayaan Perempuan Pada Penyelenggaraan Program Life Skills Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sipatuwo Deceng. *Journal of Education Sciences: Foudation & Application (JESFA)*, 2(1), 24–46.
- Alimi, R., & Darwis, R. S. (2023). Penerapan community based tourism di desa wisata mengarah pada keberlanjutan lingkungan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 4(225), 436–443. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20377>

- Anshori, Y. T. El, & Enceng, E. (2024). Empowering Rural Tourism through BUMDes Innovation : An Exploratory Study in Klaten Regency. *Advances in Tourism*, 2(3), 92–103.
- Apriyanto., & Hamdany, M. A. (2025). Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan Pariwisata Berbasis Komunitas di Wilayah Indonesia. *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 116–127. <https://doi.org/10.58812/sish.v2.i03>
- Ardianti, Y., & Eprilianto, D. F. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI PENDEKATAN COMMUNITY BASED TOURISM (Studi Pada Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto) Yuli Ardianti Deby Febriyan Eprilianto. *Publika*, 10(4), 1269–1282.
- Asmara, S. A., Padmaningrum, D., & Sugihardjo, S. (2024). Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Pengelolaan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul). *Journal of Tourism and Creativity*, 8(1), 16–20.
- Dangi, T. B., & Jamal, T. (2016). An Integrated Approach to “ Sustainable Community-Based Tourism .” *Sustainability*, 8(475). <https://doi.org/10.3390/su8050475>
- Fionasari, R. (2024). Economics Studies and Banking Journal. *Economic Studies and Banking Journal*, 1(1), 1–8.
- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model and community participation. *African Journal of Hospitality and Leisure*, 7(4), 1–27.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community-Based Tourism: a success ? *Tourism Research and Development Journal*, 1–37.
- Herlanti, E. V., & Sanjaya, R. B. (2022). Industri pariwisata saat ini menjadi sektor yang menjanjikan di Indonesia . aspek masyarakat . Memang tidak dipungkiri , ada dampak negatif yang timbul dari di Desa Wisata Nglangeran . Kelompok-kelompok kesenian yang sempat vakum. *KRITIS*, 31(2), 132–149.
- Hutagalung, Abdul Jalil, Saragih, Wike Ardinawati, & Ambarita, D. S. (2025). PARIWISATA BERKELANJUTAN SEBAGAI MOTOR PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL: STUDI KOMPARATIF WILAYAH PESISIR DAN PEGUNUNGAN DI SUMATERA UTARA. *Journal of Social and Economics Research*, 7(1), 872–888.
- Ilhami, M. R., & Salahdin. (2021). HUBUNGAN ANTARA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN COMMUNITY BASED TOURISM : *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 100–120.
- Imbaya, B. O., Nthiga, R. W., Sitati, N. W., & Lenaiyasa, P. (2019). Capacity building for inclusive growth in community-based tourism initiatives in Kenya. *Tourism Management Perspectives*, 30, 11–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.01.003>
- Ismail, E., & Sari, S. D. S. R. (2024). DIGITAL COMMUNICATION UTILIZATION OF WOMEN MANAGING HOMESTAYS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN INDONESIA ' S SMALL ISLANDS OF KEPULAUAN SERIBU a Ervan Ismail , b Siti Dewi Sri Ratna Sari. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(2), 1–23.
- Jamalina, I. A., & Wardani, D. T. K. (2017). STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA MELALUI KONSEP COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DAN MANFAAT SOSIAL DAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT DI DESA WISATA. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 71–85. <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.4008>
- Jaya, M. (2024). Penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan desa wisata melalui pendidikan dan pelatihan berbasis komunitas. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 11(1), 31–44. <https://doi.org/10.21831/jppm.v11i1.63391>
- Kamila, V., & Sutanto, H. (2025). Pengelolaan Ekowisata Berbasis CBT (Community Based. *Ekonisnis*, 11(2), 284–299.
- Khusnawati, M. A., & Wahyudi, A. (2023). PENERAPAN KONSEP COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA. *Tourism Scientific Journal*, 9(1), 28–39.

- <https://doi.org/10.32659/tsj.v9i1.303>
- Kontogeorgopoulos, N., & Churyen, A. (2014). Success Factors in Community-Based Tourism in Thailand : The Role of Luck , External Support , and Local Leadership. *Tourism Planning & Development*, 11(1), 106–124.
- Lee, T. H., & Jan, F.-H. (2019). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents' perceptions of the sustainability. *Tourism Management*, 70, 368–380. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.003>
- Muchlis, N. F. F., AB, A. F. M., & Wahyuni, S. (2024). Developing Tourism Products Through Social Media Training for Rural Communities Pengembangan Produk Wisata Melalui Pelatihan Media Sosial Pada Masyarakat Desa. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 362–368.
- Musdah, E., Nurdin, W. N., & Asmarianti, A. (2024). Policy Networks in Community-Based Tourism Management. *Proceedings / Indonesian Association of Public Administration*, 333–350.
- Ngo, T. H., & Creutz, S. (2022). Assessing the sustainability of community-based tourism : a case study in rural areas of Hoi An , Vietnam Assessing the sustainability of community-based tourism : a case study in rural areas of Hoi An ,. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2116812>
- Nurhidayati, S. E. (2015). Studi evaluasi penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai pendukung agrowisata berkelanjutan The evaluation study of implementation as Community Based Tourism (CBT) on supporting sustainable agritourism Sri Endah Nurhidayati Pendahuluan Community. *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, 28(1), 1–10.
- Pane, R. P., Nasution, H. F., Susanto, A., Rafi, M., & Fatmawati, F. (2025). Pentahelix Model in Community Based Tourism Development: Roles , Challenges , and Synergy Enhancement. *Indoneian Journal of Tourism and Leisure*, 6(2), 146–162. <https://doi.org/10.36256/ijtl.v6i2.565>
- Pasanchay, K., & Schott, C. (2021). Community-based tourism homestays' capacity to advance the Sustainable Development Goals: A holistic sustainable livelihood perspective. *Tourism Management Perspectives*, 37, 100784. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100784>
- Permadi, W. K., Wanusmawati, I., & Khairina, D. R. (2025). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Systematic Literature Review Pada Penerapan Society Centered Approach dalam Pengembangan Pariwisata Desa). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 22654–22661.
- Qodriyati, T. U., Puspitasari, S. W., Widayawati, M., Purnamasari, I., Salim, T. F., & Islami, Z. (2025). Pemberdayaan Pemuda Berbasis Pengolahan Sampah Menjadi Rupiah Pada Karang Taruna Forzela. *Kolokium: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 20(1), 23–34. <https://doi.org/10.17977/um041v20i12025p23-34>
- Queiros, D. R., Conradie, N., & Botha, E. (2025). Non-Formal Education on Sustainable Tourism for Local Stakeholders in the Marico Biosphere Reserve : Effectiveness and Lessons Learned. *Sustainability*, 17(20), 1–22.
- Raharjo, D., & Wirahayu, Y. A. (2025). Analisis Penerapan Community Based Tourism Pada Wisata Kampung Keramik Dinoyo, Kota Malang. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 7(1), 121--133.
- Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., & Ismail, S. (2015). Perceived sociocultural impacts of tourism and community participation: A case study of Langkawi Island. *Tourism and Hospitality Research*. <https://doi.org/10.1177/1467358415610373>
- Salazar, N. B. (2020). Community-based tourism and sustainability: Global lessons. *Journal of Tourism Futures*.
- Saragih, M. A. P., & Karunia, R. L. (2025). Microfinance and Community Empowerment Through Kampung Madani Program PT Permodalan Nasional Madani. *KnE Social Sciences*, 10(15), 580–596. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i15.19214>
- Seraphin, H. (2018). No Title. *Tourism Management*, 69, 523. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.07.005>
- Stone, M. T., Stone, L. S., & Nyaupane, G. P. (2022). Theorizing and contextualizing protected areas, tourism

- and community livelihoods linkages. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(11), 2495–2509. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.2003371>
- Suleman, S. A., & Arsyad, Y. (2024). Evaluasi Pemanfaatan Potensi Pariwisata Melalui Pendekatan Community Based Tourism Di Desa Botutonuo Kecamatan Kabilia Bone. *Publisitas: Journal of Social Sciences and Politics*, 11(1), 1–10.
- Sumandi, Su., & Rizkikadduhani, A. (2024). Determinants of Visit Decisions in Cultural Tourism: A Quantitative Approach. *Advances in T*, 2(1), 38–49.
- Susanto, D., Natalia, D., Jeniva, I., Lianto, L., Veronica, M., & Setinawati, S. (2022). Brand Knowledge Training Through Packaging Materials and the Use of Social Media in Hurung Bunut Village, Gunung Mas District. *AMALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 81–89.
- Tohopi, R., Ngabito, F. M., & Mukdin, N. B. (2025). Implementasi Community-Based Tourism sebagai Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(1), 159–171.
- Vinodan, A., & Meera, S. (2024). Exploring the Role of Non-Formal Education in Tourism Resource Management. *Australian Journal of Environmental Education*, 40(4), 662–675. <https://doi.org/10.1017/aee.2024.11>
- Widyaningsih, H. (2020). Pengembangan Pengelolaan Homestay Dalam Mendukung Desa Wisata Diro. *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 11(1), 9–15.
- Yustakim, A., & Hos, J. (2025). Kajian literatur strategi pemberdayaan komunitas pengelola wisata dalam mendukung keberhasilan desa wisata. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 5(1), 53–64.
- Zainal, S., Nirzalin, N., Yunanda, R., Ilham, I., & Badaruddin, B. (2024). Actualizing local knowledge for sustainable ecotourism development in a protected forest area: insights from the Gayonese in Aceh Tengah, Indonesia development in a protected forest area: insights from the Gayonese. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2302212>